

Operasi Militer dan Pemilu di Papua

Oleh Ikrar Nusa Bhakti

Judul yang saya buat di atas berbeda dengan permintaan panitia, karena dalam perkiraan saya sangat kecil kemungkinan diterapkannya Darurat Militer di Papua pada saat pemilihan umum 2004 mendatang, baik pada saat pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD maupun saat Pemilihan Presiden Langsung putaran pertama dan kedua. Perkiraan itu didasari oleh empat asumsi: **Pertama**, sebagian besar masyarakat Papua sudah trauma dengan operasi militer besar-besaran di wilayah mereka; **Kedua**, terkait dengan asumsi pertama tersebut, masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan lebih mengutamakan cara-cara dialog dengan pemerintah Indonesia ketimbang memilih perlawanan bersenjata dalam menyelesaikan konflik vertical di antara keduanya; **Ketiga**, walaupun masih terjadi penyerangan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap penduduk sipil, objek vital strategis ataupun instalasi-instalasi militer; ini dilakukan secara sporadic tanpa didukung oleh kekuatan bersenjata yang cukup besar; keempat, OPM merupakan simbol masa lalu perlawanan rakyat Papua terhadap Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Namun, tidak seperti Angkatan Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), OPM tidak memiliki kekuatan senjata yang amat kuat yang dapat mengancam kedaulatan nasional Indonesia di Papua. OPM juga tidak memiliki struktur organisasi dan garis komando yang tunggal, melainkan terpecah belah atas berbagai kelompok kecil yang didasarkan oleh ikatan wilayah atau etnik.

Permintaan panitia untuk mengupas kemungkinan diterapkannya Darurat Militer (DM) di Papua menjelang pemilu 2004 memang dapat dimaklumi, karena pada Oktober 2003 Panglima TNI telah memerintahkan digelarnya 4 batalion baru ke Papua sebagai tambahan atas tentara yang sudah ada sebelumnya yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Empat battalion baru itu bertugas untuk menjaga objek-objek vital strategis di Papua (khususnya daerah pertambangan), wilayah perbatasan, dan kota Jayapura dan sekitarnya. Namun, seperti saya kemukakan di atas, tidak ada tanda-tanda yang kuat untuk diterapkannya DM di Papua. Papua bukanlah Aceh, di mana GAM dalam upayanya memperoleh kemerdekaan memiliki kekuatan bersenjata yang cukup kuat dan dapat mengancam kedaulatan nasional RI.

Selain itu, walaupun jumlah kekuatan TNI yang digelar di Papua tampaknya cukup besar, namun jika dibandingkan dengan luas wilayah Papua yang begitu besar, jumlah pasukan tersebut dapat dikatakan masih wajar. Hanya saja kita patut bertanya, apakah perlu menambah jumlah pasukan ke Papua di kala kondisi keamanan di Papua sampai kini cukup kondusif? Tambahan pasukan untuk menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Niugini yang begitu panjang dan luas memang masuk akal. Namun jika kita kaitkan dengan begitu baiknya hubungan Indonesia-PNG saat ini dan beralihnya operasi sporadic OPM dari wilayah perbatasan ke wilayah pegunungan tengah, perkotaan serta objek-objek vital strategis, maka penambahan pasukan ke perbatasan tampaknya cukup mengherankan, kecuali jika itu hanya merupakan bagian dari rotasi pasukan. Pertanyaan lain yang perlu diajukan, dapatkah panglima TNI melakukan penggelaran pasukan tanpa adanya keputusan politik ataupun perintah dari otoritas politik, dalam hal ini Presiden, untuk mengerahkan pasukan seperti yang diatur dalam UU No 3/2002 mengenai Pertahanan Negara? Dari sudut pandang militer, penggelaran tambahan pasukan ke Papua mungkin didasari oleh adanya "kepercayaan" di

kalangan intelijen dan TNI bahwa ada konspirasi politik dari negara-negara asing untuk mengganggu integritas wilayah Indonesia, khususnya di Papua dan Aceh. "Kepercayaan" atau "kecurigaan" ini didasari oleh trauma atas lepasnya Timor Timur pada 1999, walaupun dari segi hukum internasional Timor Timur belum merupakan wilayah RI.

Kilas Balik

Jika kita melakukan kilas balik atas berbagai kejadian politik di Papua sejak 1963 hingga kini, meski situasi politik di wilayah itu berkali-kali memanas, namun sepengetahuan saya operasi militer di Papua belum pernah sampai menjurus pada diterapkannya Darurat Militer di Papua. Sebagai contoh, pada masa transisi politik sejak ditandatanganinya Persetujuan New York antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada Agustus 1962 sampai dengan dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (pepera) di Irian Barat pada Juli/ Agustus 1969, berbagai operasi militer untuk menumpas perlawanan rakyat Papua khususnya sejak OPM melakukan gerakan-gerakan sporadic sejak 1965, pemerintah RI tidak pernah memberlakukan Darurat militer di wilayah Irian Barat.

Ketika pemilihan umum berlangsung pada 1977 dan terjadi pemberontakan di wilayah pegunungan tengah, pemerintah juga tidak memberlakukan Darurat militer. Gerakan-gerakan besar OPM di Jayapura dan wilayah perbatasan yang menjulur dari utara sampai ke selatan yang menimbulkan arus pengungsi/pelintas batas dari Irian Jaya ke PNG pada 1984/1985 yang mencapai lebih dari 10.000 orang juga dihadapi militer tanpa diberlakukannya Darurat Militer di Irian Jaya.

Demonstrasi besar-besaran antara Sentani dan Jayapura dan kerusuhan di pasar Abepura pada 1992 ketika jenazah Dr. Tom Waggai yang meninggal di Rutan Salemba tiba di Jayapura, juga tidak diterapkan Darurat Militer.

Kerusuhan antar etnik yang terjadi di Wamena pada tahun 2000 yang menyebabkan banyak tewasnya kaum pendatang, juga tidak diberlakukan Darurat Militer Terbatas di Wamena. Selain itu, terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay pada 11 November 2001 yang menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Papua pasca jatuhnya Presiden Soeharto juga tidak menyebabkan diberlakukannya Darurat Militer di Papua.

Dari berbagai contoh tersebut di atas tampak jelas bahwa penerapan Darurat Militer belum pernah diberlakukan di Papua dalam kurun waktu tersebut.

Dalam kurun waktu 2003 memang terjadi berbagai peristiwa kerusuhan di Papua, terbesar di Timika pada Oktober 2003 karena terjadi pro dan kontra antar masyarakat mengenai pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah. Namun hal itu dapat diselesaikan melalui jalur adat dan tidak sampai menyebabkan operasi militer besar-besaran di wilayah itu.

DM di Papua saat Pemilu ?

Kembali ke persoalan apakah akan diberlakukan DM di Papua saat pemilu 2004, tampaknya kecil kemungkinan hal itu akan diberlakukan. Selain didukung oleh berbagai asumsi di atas, pada saat pemilu 2004 pasukan TNI tentunya akan disebar ke berbagai wilayah di Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa "berdarah-darah" (Istilah KSAD Jenderal TNI

Ryamizard Ryacudu) di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini pasukan TNI masih terkonsentrasi di Aceh. Karena itu kecil kemungkinan DM akan diberlakukan juga di Papua.

Bercermin pada masa lalu, pemilu pada masa Orde Baru di Papua secara umum dapat berjalan lancar. Jika ada wilayah yang dianggap rawan konflik, biasanya para pemuka agama akan menyatakan kepada pemerintah berapa angka yang dibutuhkan Golkar, mau 80%,85% atau 100%? Lebih baik sebutkan saja angka kemenangan buat Golkar dan tak perlu mengadakan pemilu di wilayah itu untuk mencegah konflik di dalam masyarakat. Kalangan militer saat itu pada acara-acara 17 Agustus juga biasanya mengatakan bersyukur bahwa Golkar memperoleh angka 85% dan mudah-mudahan pada pemilu mendatang angka kemenangan itu akan bertambah.

Pemilu di era reformasi di Papua, 1999, juga masih dimenangkan oleh Golkar. Tidaklah mengherankan jika ada anggapan bahwa dipecahnya wilayah Papua menjadi tiga provinsi salah satunya adalah upaya dari kalangan PDI-P untuk memecah suara Golkar di Papua pada pemilu 2004. Namun alangkah naifnya jika untuk memperbesar suara PDI-P pemerintah harus menerapkan Darurat Militer di Papua. Di era multi partai ini keputusan politik yang tidak menguntungkan semua pihak yang berkompetisi tentunya akan mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang tidak diuntungkan, dalam hal ini Golkar.

Anggapan bahwa TNI sengaja menambah jumlah tentara ke Papua untuk memancing amarah rakyat Papua dan dengan demikian ada alasan untuk memberlakukan DM di Papua, tampaknya juga amat naif. Apalagi, seperti telah diutarakan di atas, TNI saat ini tidak memiliki kapabilitas untuk digelar secara besar-besaran atas nama Darurat Militer ke lebih dari satu provinsi. Karena Darurat Militer masih berlaku di Aceh sampai pemilu April 2004 (dan mungkin diperpanjang sampai berakhirnya putaran kedua pemilihan presiden), rakyat Papua tampaknya dapat menikmati ketenangan hidup dalam menghadapi berbagai seri pemilihan umum pada 2004 ini..***

Penulis adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Politik – LIPI, Jakarta. Tulisan singkat disampaikan sebagai bahan diskusi mengenai "Penerapan Darurat Militer di Aceh, Papua dan Poso pada Pemilu 2004" diselenggarakan oleh ProPatria, Hotel Santika, Jakarta, 7 Januari 2004.